

Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 komando dan satuan baru TNI dalam upacara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2025. Penguatan komando teritorial meliputi penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), dan tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau). Di jajaran pasukan tempur, dibentuk 20 Brigade Teritorial Pembangunan, enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satu Brigade Infanteri Marinir, dan satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Pada tingkat satuan paling bawah, pembentukan mencakup 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan 10 batalyon elit, masing-masing lima Batalyon Infanteri Marinir dan lima Batalyon Komando Kopasgat.

Pembentukan satuan baru merupakan kewenangan penuh presiden. Oleh karena itu, langkah penambahan satuan di TNI dapat dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis terkini, di mana intensitas penggunaan instrumen militer semakin meningkat hampir di semua kawasan, contohnya, ketegangan di Laut China Selatan hingga konflik Thailand-Kamboja. Selain itu, terdapat pula eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari Pakistan-India, Rusia-Ukraina, Palestina-Israel, hingga ketegangan Iran-Israel, yang menjadi ancaman nyata. Pembentukan Kodam baru serta Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari adaptasi TNI dengan tantangan lingkungan strategis. Langkah strategis ini pun bertujuan untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), dan mendukung program-program pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata urusan penambahan pasukan, tetapi bentuk penguatan pertahanan negara di tengah dinamika global dan regional yang kian dinamis. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menilai kebijakan penambahan 162 satuan baru di TNI sesuai dengan Asta Cita pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan pertahanan, mengingat tantangan yang dihadapi bangsa kian kompleks.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Amelia Anggraini, menilai penambahan struktur organisasi TNI akan membawa konsekuensi pada beban anggaran negara. Saat ini, porsi belanja rutin TNI sudah berkisar 60–70 persen dari total anggaran TNI. Sebagian besar belanja rutin itu dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan operasional harian. Setiap kebijakan penambahan struktur harus diiringi dengan perencanaan anggaran yang matang. Selain itu, efisiensi organisasi dan prioritas yang jelas pada peningkatan kemampuan tempur dan kesejahteraan prajurit. Secara keseluruhan, Komisi I DPR RI juga mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengabaikan kesejahteraan prajurit maupun penguatan alat utama sistem pertahanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan rencana penambahan dan pengembangan berbagai satuan dan struktur pada tiga matra TNI telah melalui berbagai kajian matang, termasuk soal anggaran. Penambahan sejumlah satuan tersebut secara otomatis akan berdampak pada kebutuhan anggaran. Namun demikian, organisasi militer tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada upaya mengantisipasi ancaman. Ancaman yang lebih besar membutuhkan postur pertahanan yang lebih besar untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Postur TNI ideal terdiri dari tiga komponen utama: sumber daya manusia yang terlatih, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang memadai, dan sistem operasional yang efektif.

Atensi DPR

Sebagai respons terhadap dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan terus berkembang, penguatan kapasitas militer Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan, untuk menghimbau Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar penambahan satuan baru dalam struktur organisasi TNI diimbangi dengan peningkatan kapabilitas personel serta interoperabilitas antarmatra TNI. Upaya ini dapat dilakukan melalui modernisasi teknologi pertahanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Komisi I DPR RI juga perlu mendorong agar Kementerian Pertahanan tetap memprioritaskan kesejahteraan prajurit sebagai pilar utama kekuatan pertahanan, di samping memperkuat Alutsista Nasional untuk menciptakan postur pertahanan yang tangguh, responsif, dan berdaya gentar tinggi.

Sumber

antaranews.com, 12 Agustus 2025;
kompas.id, 11 Agustus 2025;
nasional.kompas.com, 11 Agustus 2025;
tempo.co, 13 Agustus 2025; dan
tirto.id, 13 Agustus 2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*